

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : ISMAIL PAISULY
NIK : 8101151701650002
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA NAMLEA
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 6 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

I. DATA PRIBADI

- 1. Nama : ISMAIL PAISULY
- 2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
- 3. NHK : 464661

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	821.000.000
1. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA MALUKU TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000		
2. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA MALUKU TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/128 m2 di KAB / KOTA MALUKU TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	22.000.000
1. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA XEON Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA 45P (BYSON) Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	6.450.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.515.150
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	851.965.150
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	851.965.150

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.